

Merevitalisasi Pewacanaan UBI

TAUCHID KOMARA YUDA, Dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM

UBI dinilai penghormatan paling mulia terhadap pekerja berpenghasilan rendah yang selama ini tereksklusikan secara sosial-ekonomi.

Sebelum pandemi, wacana transfer pendapatan universal belum menjadi prioritas. Kalaupun ada, hanya berupa bantuan sosial terbatas bagi masyarakat miskin. Datangnya Covid-19 mendorong transformasi risiko yang tak memiliki penyebab langsung muncul, dengan tidak ada cara yang jelas atau mudah meminimalisasi efeknya. Namun, menjadi miskin adalah risiko yang pasti. Setiap kita berpotensi mengalaminya.

Banyak pemerintah di dunia selama pandemi mulai mewacanakan *universal basic income* (UBI). Tak sedikit yang keberatan. Sebab, skema transfer pendapatan dinilai membuat masyarakat tak produktif, tak kompetitif, dan cenderung mendemotivasi mereka yang bekerja.

Alasannya, seberapa pun mereka berusaha selama hidup di bawah garis minimum akan menerima penghasilan bulanan minimum setara dengan mereka yang tidak bekerja.

UBI sudah lama diperdebatkan di berbagai negara maju sebagai hak sosial. Dalam konsep orisinalnya, UBI diberikan secara universal dan tanpa syarat. Artinya, setiap warga negara menerimanya terlepas dari kondisi mereka.

Dalam pewacanaan lebih ekstrem, tak ada batasan bagaimana uang itu digunakan. Ide ini terdengar radikal dan utopis pada masa kini, tetapi sekali lagi, sama sekali bukan barang baru. Bahkan, politisi di negara liberal seperti AS mengupayakan fitur semacam ini.

Pada 1969 contohnya, Presiden Richard Nixon berusaha mengadvokasi proposal yang disebut rencana tunjangan keluarga, menggantikan berbagai program kesejahteraan yang dianggap terlalu rumit dan birokratis.

Meski gagal di senat, rencana itu muncul kembali pada 1972 ketika calon presiden Partai Demokrat, George McGovern, mengusulkan perlunya cek senilai 1.000 dolar AS

yang diberikan kepada setiap warga negara (Emba, 2015).

Alasan banyak negara turut mengadvokasi UBI karena menyadari keutamaannya sebagai instrumen perlindungan pendapatan: memastikan dan mencegah tak seorang pun rentan, apalagi miskin jika sewaktu-waktu terjadi guncangan ekonomi.

Ini sekaligus menjaga daya beli masyarakat (Midgley dan Tang, 2008). Fungsi terakhir ini penting agar sistem ekonomi pasar bekerja optimal sehingga mendorong kurva permintaan dan penawaran menuju titik keseimbangan baru.

Lebih jauh, bagi pendukungnya, UBI efektif mengurangi ketimpangan dan bukan sekadar jaring pengaman sosial. Argumen moral yang mendasarinya, UBI wujud pengakuan terhadap warga negara karena kontribusi penting dalam kapasitasnya masing-masing.

UBI dinilai penghormatan paling mulia terhadap pekerja berpenghasilan rendah, yang selama ini tereksklusikan secara sosial-ekonomi.

Jika UBI dianggap memberatkan anggaran, terutama bagi negara berpenghasilan menengah dan rendah, mengeksklusi orang kaya dari daftar penerima manfaat bisa jadi solusi (Djani, 2020), tetapi memprioritaskan yang berpenghasilan rendah lebih masuk akal.

Toh dalam kasus Indonesia dan negara berkembang lainnya, sumbangsih terbesar ekonomi nasional justru dari pelaku perekonomian informal skala mikro: banyak pekerja berpenghasilan rendah terlibat di dalamnya.

Sementara argumen logisnya, biaya mencegah kemiskinan sedini mungkin lebih murah daripada membayar untuk intervensi, saat individu telanjur masuk perangkap kemiskinan karena efeknya yang multidimensi.

Kemiskinan pun dianggap akar konflik sosial dan *public distrust* sehingga politisi yang ingin menghindarinya, memandang UBI sebagai prioritas, terutama pada masa genting saat ini.

Yang perlu diketahui, bekerja sebagai jalan keluar terbaik dari kemiskinan mungkin hanya berlaku bagi sebagian kelompok orang. Kenyataannya, mayoritas masyarakat kita saat ini justru terjebak pekerjaan berupah dan keterampilan rendah.

Kondisi ini menjadikan kerja keras mereka yang berpenghasilan rendah tak akan mengurangi ketimpangan ekonomi. Berangkat dari argumen ini, justifikasi UBI hanya menjadikan demotivasi kerja tak dapat sepenuhnya diterima.

Ini bergantung paradigma yang dibangun program sosial itu sendiri dikomunikasikan kepada masyarakat (Dent, 2019). Maka itu, UBI perlu dijauhkan dari kesan '*free money hand-sout*'.

UBI harus dikonstruksikan secara sosial sebagai instrumen, yang 'tidak' membuat penerima manfaatnya kaya, tapi punya kehidupan lebih layak.

Dengan pemahaman seperti ini, UBI dapat meningkatkan daya tawar pekerja agar terhindar dari pekerjaan eksploitatif, memberi rasa aman sembari individu bisa mengejar peluang ekonomi lain atau sebagai cara berinvestasi produktif di samping penguatan daya beli. ■



DAAN YAHRA/REPLIKA

Baca Opini
di **republika.id**
Pindai QR Code ini

